

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengendalian sebagai suatu proses diperlukan oleh seluruh aktivitas dalam suatu organisasi. Pengendalian merupakan kegiatan membandingkan kinerja yang sebenarnya dengan yang seharusnya atau yang direncanakan. Fungsi pengendalian untuk mengukur, mengevaluasi dan mengusahakan agar setiap pelaksanaan dan tindakan berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, selain itu juga untuk mengambil tindakan perbaikan jika diperlukan. Kegiatan pengendalian diperlukan disetiap organisasi dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat. Organisasi yang berorientasi pada laba maupun yang tidak memerlukan aktivitas pengendalian untuk menjamin bahwa kebijakan manajemen telah ditetapkan.

Pemerintahan memerlukan adanya pengendalian untuk menjamin tujuan atau rencana-rencana yang telah ditetapkan berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan berhasil guna. Pengendalian atas penyelenggaraan pemerintah dilaksanakan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara, keandalan laporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan. Aset yang didalamnya termasuk kas negara adalah jenis aset yang sangat likuid dibandingkan dengan jenis aset yang lain. Sifat aset yang rawan terhadap pencurian atau penyalahgunaan maka diperlukan adanya pengendalian yang efektif terhadap kas tersebut. SPIP yang efektif diharapkan mampu melindungi kas dari pencurian ataupun penyalahgunaan dan diharapkan kas yang ada dapat memenuhi kebutuhan yang ada.

Di Pemerintah Daerah Kota Blitar segala macam transaksi yang melibatkan kas harus melewati Kantor Kas Daerah Kota Blitar sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Blitar (BUD). Pendapatan maupun pengeluaran kas di semua Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) harus melalui Kantor Kas Daerah dengan sistem dan prosedur yang sudah ditetapkan dan dengan persyaratan kelengkapan untuk pencairan kas. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 33 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Kantor Kas Daerah Kota Blitar, sebagai unit Pengelola Perbendaharaan Uang Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Kas Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas melaksanakan ketatusahaan keuangan, penerimaan setoran dari unit penghasil dan pendapatan daerah lainnya, menyelesaikan permohonan realisasi belanja, penyelesaian masalah dan perbendaharaan kas daerah.

Tugas pokok Kantor Kas Daerah bukanlah hal mudah dalam pelaksanaannya. Diperlukan kuantitas dan kualitas pegawai yang memiliki kemampuan dan keahlian serta sistem yang bagus dalam mengelola dan menatausahakan keuangan daerah. Fenomena yang terjadi, dalam

pelaksanaan tugas pokok Kantor Kas Daerah Kota Blitar masih menemui permasalahan-permasalahan yang menghambat kinerja. Seperti yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2011 terdapat permasalahan-permasalahan diantaranya:

- a. Peraturan dibidang pengelolaan keuangan yang berubah-ubah;
- b. Keterbatasan SDM dibidang keuangan dan penguasaan IT;
- c. Masih ada personil yang kurang inovatif dan cenderung menunggu perintah dari pimpinan;
- d. Masih ada personil yang cenderung menunda pekerjaan;
- e. Belum adanya sanksi nyata bagi yang melanggar aturan disiplin.

Berdasarkan tugas pokok Kantor Kas Daerah seperti tersebut diatas dan dengan adanya fenomena yang terjadi, maka diperlukan adanya sistem pengendalian intern yang efektif guna menjamin keamanan kas daerah demi terselenggaranya program dan kegiatan pemerintah kota Blitar dengan baik. Mengingat bahwasannya hampir semua transaksi keuangan akan melibatkan kas daerah, selain itu juga kas dengan segala sifatnya adalah aset yang mudah untuk diselewengkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dirasa perlu untuk melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pengeluaran Kas pada Kantor Kas Daerah Kota Blitar"**.

B. Permasalahan

Terkait tugas pokok Kantor Kas Daerah sebagai pengelola dan penatausahaan keuangan daerah diperlukan adanya sistem pengelolaan keuangan dan dilaksanakan oleh pegawai yang memiliki kemampuan dan keahlian dengan jumlah yang memadai. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa permasalahan yang menghambat kinerja pegawai sehingga tugas pokok yang telah ditetapkan tidak bisa berjalan dengan optimal. Permasalahan yang sering muncul di Kantor Kas Daerah Kota Blitar khususnya di Seksi Pengeluaran antara lain:

1. Ditemukan selisih ketika melakukan rekonsiliasi penyerapan dana dengan SKPD terkait, baik Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Propinsi (Banprop) dan dana lain yang mungkin diterima dari Pemerintah Pusat.
2. Penyampaian laporan penyerapan dana yang beberapa kali melewati batas waktu yang ditentukan.
3. Kecenderungan untuk menunggu konsultan ketika menemui kesulitan terkait perangkat keras dan perangkat lunak komputer.
4. Format laporan yang tidak sesuai dengan permintaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga perlu waktu yang lama ketika mencukupi permintaan dari BPK.

Dari permasalahan diatas maka dapat dikatakan bahwa sistem pengendalian internal pada pengeluaran kas daerah Kota Blitar masih belum efektif.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem pengendalian internal atas sistem pengeluaran kas daerah yang efektif?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pengendalian internal atas sistem pengeluaran kas daerah yang efektif.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian terdiri dari:

1. Bagi Penulis

Mengetahui bagaimana efektifitas pengendalian internal pada system pengeluaram kas di Kantor Kas daerah Kota Blitar.

2. Bagi Perguruan Tinggi

Menambah referensi penelitian dibidang Akuntansi Pemerintahan.

3. Bagi Kantor Kas Daerah Kota Blitar

Hasil simpulan dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi Kantor Kas Daerah.